

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dan memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan suatu Negara. Indonesia merupakan salah satu Negara yang dianugerahi keindahan alam baik flora dan fauna serta keanekaragaman budaya dan potensi kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh Negara lain. Melimpahnya potensi tersebut sangat berpotensi besar sebagai objek pariwisata mulai dari ujung barat Sabang hingga ujung timur Merauke, maka tidak heran jika Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjadi tujuan destinasi wisata oleh wisatawan baik lokal maupun internasional. Potensi pariwisata di Indonesia merupakan salah satu potensi yang dapat menumbuhkembangkan rasa bangga terhadap bangsa dan dapat bernilai ekonomi tinggi serta bermanfaat bagi suatu daerah apabila dikelola menjadi sesuatu hal yang menarik. Maka dari itu, potensi pariwisata di Indonesia harus dibangun dan dikembangkan.

Pembangunan dan pengembangan pariwisata di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pasal 6 yang menyebutkan bahwa “Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata”. Berdasarkan aturan tersebut, pembangunan pariwisata harus mencerminkan suatu hal yang unik, khas serta terdapat keanekaragaman alam dan budaya di setiap daerah.

Pembangunan pariwisata bagi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 12 ayat 3(b) merupakan salah satu urusan pilihan. Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang dan pilihan dalam mengelola dan mengatur pariwisata yang ada didaerahnya.

Desa merupakan salah satu bagian dari daerah yang memiliki peran serta kontribusi yang cukup besar dalam kemajuan suatu daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 4(d) yang menyebutkan bahwa

pengaturan desa bertujuan untuk “mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama” dan pasal 19(b) yang menyebutkan bahwa kewenangan desa yaitu meliputi “kewenangan lokal berskala desa.” Berdasarkan kebijakan tersebut dapat memberikan kewenangan yang lebih besar bagi para pembuat kebijakan dan masyarakat untuk dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

Salah satu potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan yaitu dengan membangun pariwisata. Pembangunan pariwisata dapat melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan baik dari pemerintah, masyarakat maupun swasta sehingga dapat memberikan dampak yang positif. Adanya keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan akan menciptakan sebuah kolaborasi untuk menyelenggarakan sebuah kebijakan dengan dukungan yang lebih besar, sehingga dalam pembangunan sektor pariwisata dapat dikatakan berhasil apabila dalam pembangunannya mampu melibatkan partisipasi pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi masyarakat lokal baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya.

Pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan konsep kolaborasi tidak hanya terbatas pada partisipasi dalam hal perencanaan, namun juga melibatkan pembiayaan yang dilakukan melalui swadaya masyarakat maupun dari pihak lain dengan sistem atau model kerja sama. Berlakunya konsep kolaborasi telah menciptakan inovasi-inovasi pada masyarakat terutama pemerintah dan masyarakat desa yang telah diberikan wewenang secara khusus untuk mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu inovasi yang diwujudkan dalam pembangunan yaitu dengan menciptakan sebuah daya tarik wisata desa atau desa wisata.

Pemerintah Desa Kemiri merupakan salah satu pemerintahan desa di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember yang telah memanfaatkan potensi dan peluang dengan sangat baik. Pemerintah Desa kemiri telah melakukan kolaborasi dalam pembangunan desa wisata berbasis *ecotourism*. Kegiatan

pembangunan yang telah dilaksanakan menjadi menarik karena lahan yang dibangun merupakan lahan pertanian salah satu warga desa yang tetap memelihara keaslian lingkungan. Hal tersebut merupakan salah satu peningkatan kualitas pembangunan serta penerapan prinsip pembangunan desa wisata yang mengedepankan konsep *ecotourism* atau ekowisata yang melibatkan partisipasi masyarakat. Desa wisata berbasis *ecotourism* merupakan salah satu strategi dalam memobilisasi masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan pariwisata serta upaya dalam pelestarian lingkungan baik alam maupun budaya.

Keterbatasan kemampuan maupun sumber daya serta jaringan yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam terlaksananya suatu program, mendesak pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik dengan sesama pemerintah, masyarakat maupun dari pihak swasta sehingga dapat terjalin suatu kolaborasi dalam menyelenggarakan suatu program maupun kebijakan. Pemerintah Desa Kemiri relatif berhasil dalam membangun pariwisata berbasis *ecotourism*, sehingga Desa Kemiri merupakan satu-satunya desa yang menjadi pionir desa wisata di Kabupaten Jember. Sebutan *The Inspiring Village* kini tersemat pada Desa Kemiri yang merupakan desa pertama di Kabupaten Jember yang memiliki desa wisata dengan modal keyakinan, tekad serta perjuangan dari berbagai pihak melalui kerja sama. Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pembangunan. Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini mengangkat judul “Peran Aktor *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Desa Wisata Berbasis *Ecotourism*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana peran aktor dalam

collaborative governance dalam membangun desa wisata berbasis *ecotourism* di Desa Kemiri?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ada, sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas akan hal tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran aktor *collaborative governance* dalam pembangunan desa wisata berbasis *ecotourism* di Desa Kemiri.

1.4 Manfaat

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Akademis

Sebagai pengembangan disiplin ilmu pemerintahan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi teoritis dalam mengetahui *collaborative governance* dalam pembangunan desa wisata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat menjadi lebih memahami dan mengetahui terkait pentingnya sebuah kolaborasi dalam pembangunan di daerah atau wilayahnya, sehingga masyarakat dapat bertindak sebagaimana mestinya.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah setempat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam upaya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan terkait upaya pembangunan dan pengembangan potensi wilayah serta kegiatan desa wisata.